



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : DINAS PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KWINTARTO HERU PRABOWO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 147511

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.491.700.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 433 m²/120 m² di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 492 m² di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 442.800.000
3. Tanah Seluas 473 m² di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 283.800.000
4. Tanah Seluas 386 m² di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 135.100.000
5. Tanah Seluas 316 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 46.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
4. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 26.200.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 26.500.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.590.400.000
III. HUTANG	Rp.	196.862.490
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.393.537.510

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.